



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOF 188/329/423.011/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH, BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,
BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN
BENDAHARA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bendahara Pengeluaran BLUD dan Bendahara Kaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KETIGA :
- a. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang bertugas:
 1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran yang bertugas:
 1. menyusun RKA unit SKPD;
 2. menyusun DPA unit SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani SPM TU dan SPM LS untuk SKPD;
 9. mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Unit SKPD;
 10. mengawasi pelaksanaan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 11. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
1. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 2. menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada SKPD;
 3. menyimpan seluruh penerimaan SKPD;
 4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
 6. menatausahakan seluruh penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah;
 7. mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 8. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

9. melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu; dan
 10. menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.
- d. Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
1. menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) SKPD;
 2. menyimpan seluruh penerimaan UPT SKPD;
 3. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 4. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
 5. menatausahakan seluruh penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah ;
 6. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 7. menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.
- e. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
1. melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 2. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 3. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 4. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. melaksanakan penatausahaan pengeluaran;

8. mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 9. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 10. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
1. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 2. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. melaksanakan penatausahaan pengeluaran;
 8. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administrasi pengeluaran yang dikelolanya kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK Unit SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 9. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang dikelolanya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

10. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. menutup Buku Kas Umum dan membuat Pegister Penutupan Kas pada setiap akhir bulan;
- g. Bendahara Penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
1. menerima penerimaan yang bersumber dari transaksi PPKD;
 2. menatausahakan seluruh penerimaan dan penyetoran pendapatan yang bersumber dari transaksi PPKD;
 3. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 4. menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.
- h. Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
1. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja PPKD pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 2. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP LS dalam rangka pembayaran belanja bunga, subsidi, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan;
 3. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 4. melaksanakan penatausahaan pengeluaran PPKD;
 5. menolak perintah bayar dari PPKD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administrasi pengeluaran yang dikelolanya kepada PPKD melalui PPK PPKD;
 7. menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir tahun.

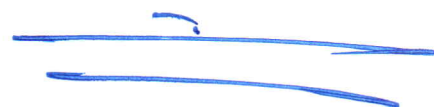
- i. Bendahara BOS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
 1. menerima dan menyimpan uang penyaluran dana BOS;
 2. menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOS;
 3. mencatat penerimaan dan belanja dana BOS pada kas umum dan kas pembantu;
 4. menyampaikan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS;
 5. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS;
 6. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS setiap tahap penyaluran;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
 1. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada BLUD;
 2. membuat dan mengajukan SPP, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP kepada Pengguna Anggaran BLUD dan menyiapkan kelengkapannya;
 3. menyiapkan dan membuat laporan bulanan BKU, pemeriksaan kas, penutupan kas pada setiap akhir bulan;
 4. mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran GU kedalam BKU, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Kas Tunai;
 5. membuat transaksi pengeluaran berdasarkan SP2D LS dan GU ke dalam Buku Kas Umum;
 6. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
 1. membuat dan mengajukan SPP, SPM, SP2D UP kepada Pengguna Anggaran BLUD dan menyiapkan kelengkapannya;

2. memeriksa, menandatangani rekap pendapatan, menerima dan menghitung setoran dari loket pembayaran kasir RSUD;
 3. membuat rekap pendapatan harian;
 4. membuat laporan realisasi pendapatan;
 5. membuat laporan rekapitulasi pendapatan bulanan;
 6. melakukan rekonsiliasi pendapatan.
1. Bendahara Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
 1. membuka rekening dana kapitasi JKN atas nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 2. membuat laporan penerimaan pembayaran dana kapitasi JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 3. bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 4. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh KPA beserta bukti transaksinya;
 5. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
 6. menguji ketersediaan dana kapitasi JKN; dan
 7. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Desember 2022

WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
 2. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan; dan
 3. Yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 329 /423.011/2022
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BENDAHARA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NO.	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN	PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
2.	BAGIAN UMUM	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM
3.	BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN HUKUM
4.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
5.	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA & KEMASYARAKATAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN DAN KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN DAN KEMASYARAKATAN
6.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN ADMINITRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
7.	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	KEPALA BAGIAN ADMINITRASI PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINITRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
8.	BAGIAN ORGANISASI	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI
9.	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
10.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
11.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TK DAN SD)
13.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (SMP)
14.	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN
15.	RSUD dr. R SOEDARSONO	DIREKTUR RSUD dr. R. SOEDARSONO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN RSUD dr. R. SOEDARSONO
16.	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG	KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGKETUG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
17.	UPT PUSKESMAS GADINGREJO	KEPALA UPT PUSKESMAS GADINGREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS GADINGREJO
18.	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI	KEPALA UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI
19.	UPT PUSKESMAS KEBONSARI	KEPALA UPT PUSKESMAS KEBONSARI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS KEBONSARI
20.	UPT PUSKESMAS TRAJENG	KEPALA UPT PUSKESMAS TRAJENG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS TRAJENG
21.	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL	KEPALA UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL
22.	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG	KEPALA UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG
23.	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG	KEPALA UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG
24.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2	3	4
27.	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
28.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
29.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
30.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
31.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
32.	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL	PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL
33.	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	PENGGUNA ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA
34.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
35.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
36.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
37.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
38.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
39.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PENGGUNA ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
40.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
41.	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD KOTA PASURUAN	PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
42.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
43.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
44.	INSPEKTORAT	INSPEKTUR KOTA PASURUAN	PENGGUNA ANGGARAN INSPEKTORAT
46.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
47.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
48.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
49.	DINAS PERIKANAN	KEPALA DINAS PERIKANAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERIKANAN
50.	KECAMATAN GADINGREJO	CAMAT GADINGREJO	PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN GADINGREJO
51.	KELURAHAN GADINGREJO	LURAH GADINGREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN GADINGREJO
52.	KELURAHAN KARANGKETUG	LURAH KARANGKETUG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KARANGKETUG
53.	KELURAHAN RANDUSARI	LURAH RANDUSARI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN RANDUSARI
54.	KELURAHAN PETAHUNAN	LURAH PETAHUNAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PETAHUNAN
55.	KELURAHAN KRAPYAKREJO	LURAH KRAPYAKREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KRAPYAKREJO
56.	KELURAHAN BUKIR	LURAH BUKIR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BUKIR
57.	KELURAHAN SEBANI	LURAH SEBANI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SEBANI
58.	KELURAHAN GENTONG	LURAH GENTONG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN GENTONG
59.	KECAMATAN PANGGUNGREJO	CAMAT PANGGUNGREJO	PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
60.	KELURAHAN PANGGUNGREJO	LURAH PANGGUNGREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PANGGUNGREJO
61.	KELURAHAN MANDARANREJO	LURAH MANDARANREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN MANDARANREJO
62.	KELURAHAN NGEMPAKREJO	LURAH NGEMPAKREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN NGEMPAKREJO
63.	KELURAHAN TAMBAAN	LURAH TAMBAAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TAMBAAN
64.	KELURAHAN MAYANGAN	LURAH MAYANGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN MAYANGAN
65.	KELURAHAN TRAJENG	LURAH TRAJENG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TRAJENG
66.	KELURAHAN BUGUL LOR	LURAH BUGUL LOR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BUGUL LOR
67.	KELURAHAN KANDANGSAPI	LURAH KANDANGSAPI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KANDANGSAPI

1	2	3	4
68.	KELURAHAN BANGILAN	LURAH BANGILAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BANGILAN
69.	KELURAHAN KEBONSARI	LURAH KEBONSARI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KEBONSARI
70.	KELURAHAN KARANGANYAR	LURAH KARANGANYAR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KARANGANYAR
71.	KELURAHAN PEKUNCEN	LURAH PEKUNCEN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PEKUNCEN
72.	KELURAHAN PETAMANAN	LURAH PETAMANAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PETAMANAN
73.	KECAMATAN BUGUL KIDUL	CAMAT BUGUL KIDUL	PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN BUGUL KIDUL
74.	KELURAHAN BUGUL KIDUL	LURAH BUGUL KIDUL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BUGUL KIDUL
75.	KELURAHAN TAPAAAN	LURAH TAPAAAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TAPAAAN
76.	KELURAHAN KEPEL	LURAH KEPEL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KEPEL
77.	KELURAHAN BLANDONGAN	LURAH BLANDONGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BLANDONGAN
78.	KELURAHAN BAKALAN	LURAH BAKALAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BAKALAN
79.	KELURAHAN KRAMPYANGAN	LURAH KRAMPYANGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KRAMPYANGAN
80.	KECAMATAN PURWOREJO	CAMAT PURWOREJO	PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN PURWOREJO
81.	KELURAHAN PURWOREJO	LURAH PURWOREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PURWOREJO
82.	KELURAHAN POHJENTREK	LURAH POHJENTREK	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN POHJENTREK
83.	KELURAHAN KEBONAGUNG	LURAH KEBONAGUNG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KEBONAGUNG
84.	KELURAHAN TEMBOKREJO	LURAH TEMBOKREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TEMBOKREJO
85.	KELURAHAN WIROGUNAN	LURAH WIROGUNAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN WIROGUNAN
86.	KELURAHAN PURUTREJO	LURAH PURUTREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PURUTREJO
87.	KELURAHAN SEKARGADUNG	LURAH SEKARGADUNG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SEKARGADUNG

WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 329 /423.011/2022
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BENDAHARA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BENDAHARA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NO.	UNIT KERJA	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN	PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
2.	BAGIAN UMUM	LUQMAN KHAKIM NIP. 19770927 201001 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN
		IKA RATNAWATI NIP. 19820816 200901 2 003 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
		CATUR NURUL UMNI UTARI, SE NIP. 19781014 200312 2 010 Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
3.	BAGIAN HUKUM	RISKY DWI SETYO FAJARIANTO, SH NIP. 19910430 202203 1 004 Penata Muda (III/a)	PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
4.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	ANDI AGUSTIA, S.STP NIP. 19960809 201808 1 001 Penata Muda (III/a)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
5.	BAGIAN ADM. KESRA & KEMASYARAKATAN	MOHAMMAD CHARIS CHIZBULLOH NIP. 19830316 201406 1 001 Pengatur (II/c)	PENGOLAH DATA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
6.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ARI DWI TITISARI, A.Md NIP. 19891221 201903 2 001 Pengatur (II/c)	PENGOLAH PENGENDALIAN MONITOR DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
7.	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN & SDA	AHMAD NIP. 19671201 201212 1 001 Pengatur (II/c)	PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
8.	BAGIAN ORGANISASI	SHELLA WAHYUNING TYAS, S.STP NIP. 19950825 201908 2 001 Penata Muda (III/a)	ANALIS KELEMBAGAAN BAGIAN ORGANISASI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
9.	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	FITRIYAH ULFA, ST NIP. 19970211 202203 2 007 Penata Muda (III/a)	PENGOLAH DATA PELAYANAN PENGADAAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
10.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	DAH KRISNAWATI NIP. 19860213 201406 2 002 Pengatur (II/c)	PETUGAS PROTOKOL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
11.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MUHAMAD ZAINULLAH, S.Pd.I NIP. 19710403 200312 1 007 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
		LULUK SULISTIYOWATI, A.Md NIP. 19760417 201406 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (TK DAN SD)
		DEWI MASITA NIP. 19811130 201406 2 001 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (SMP)
	UPT SDN BUGUL KIDUL I	TRI PUTRANTI IMA PUSPITA DEWI, S.Pd NIP. 19860712 202012 2 005 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN BUGUL KIDUL II	IZZATUL MAULA, S.Pd. NIP. 19760317 200604 2 022 Penata Muda Tk. I (III/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KRAMPYANGAN	AGUS PUJO SASONGKO, S.Pd. NIP. 19880728 201903 1 004 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN TAPAAN I	SITI MUYASSAROH, S.Pd. NIP. 19941103 202012 2 010 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS

1	2	3	4	5
	UPT SDN TAPAAAN II	NOURON NAZILAH, S.Pd NIP. 19951029 201903 2 004 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN BAKALAN	BALYA ARIFUDIN, S.Pd. NIP. 19900814 201903 1 005 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN BLANDONGAN	ARIS SISWATI, M.Pd. NIP. 19721105 200604 2 019 Penata Muda Tk. I (III/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KEPEL	LILIK TOYIBAH, S.Pd. NIP. 19850209 200904 2 001 Pengatur (II/c)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN PURUTREJO I	NUR LAILATUR ROHMAH, S.Pd. SD NIP. 19870729 200904 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN PURUTREJO II	NUR ANISAH NIP. 19830607 201406 2 001 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KEBONAGUNG	EWAHYU AGUNG SETIAWAN, S.Pd. NIP. 19870822 201903 1 004 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN PURWOREJO I	SUTIM MUNARSIH, S.Pd.SD. NIP. 19720402 199308 2 001 Pembina (IV/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN PURUWOREJO III	NANIK FARIDA, S.Pd. NIP. 19660510 198703 2 011 Pembina (IV/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN WIROGUNAN	ICCA NURIKA LALITA, S.Pd NIP. 19870308 200904 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN TEMBOKREJO II	ENGKY AGUS PRAMUDIANTORO, S.Pd. NIP. 19750816 200904 1 001 Penata (III/c)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN SEKARGADUNG	SITI ALIYAH, S.Pd NIP. 19851003 201903 2 004 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN POHJENTREK I	WILUDJENG ANDRIJANI, S.Pd. NIP. 19690413 200904 2 001 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN POHJENTREK II	SUPARMI, S.Pd. NIP. 19710707 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN BUKIR	HARUM MUSTIKANINGSIH, S.Pd.SD. NIP. 19860323 201903 2 005 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KRAPYAKREJO I	SUPARTO, S.Pd. NIP. 19670814 198904 1 001 Pembina (IV/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KARANGKETUG I	BHERNA ANNISA WIJAYANTI, S.Pd. NIP. 19850420 201101 2 010 Penata Muda Tk. I (III/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KARANGKETUG II	AHMAD FAUZI, S.Pd. NIP. 19860409 201101 1 012 Penata (III/c)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KARANGKETUG III	Hj. TASLIMAH, S.Pd. NIP. 19640725 199101 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN PETAHUNAN I	RIFQOTUL FAUZIAH, S.Pd. NIP. 19761101 200604 2 031 Penata Muda Tk. I (III/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN SEBANI	DEWI LULUK CHAROMAH, S.Pd NIP. 19720613 200801 2 010 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KRAPYAKREJO II	NURIWATI, S.Pd NIP. 19850103 200904 2 002 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN GENTONG	DINA NOVITA PURNAMANINGSIH, S.Pd. NIP. 19841124 201101 2 013 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN TRAJENG I	FATMAWATI, S.Pd. NIP. 1967104 200701 2 015 Penata Muda Tk. I (III/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN GADINGREJO I	TANJUNG SOOKO AMASTANI, S.Pd. NIP. 19850903 201001 2 028 Penata (III/C)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN GADINGREJO II	JIAMINAH, S.Pd.SD. NIP. 19721211 200604 2 011 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS

1	2	3	4	5
	UPT SDN PETAHUNAN II	FITRIA NILAWATI, S.Pd.SD. NIP. 19830716 200904 2 001 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN RANDUSARI	NUR ISTIQOMAH, S.Pd. NIP. 19941009 201903 2 007 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN BANGILAN	SURIFAH, S.Pd.SD. NIP. 19691215 200701 2 014 Penata Tk. I (III/d)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN PEKUNCEN	Hj. IDA ARIANI, M.Pd. NIP. 19640320 198303 2 002 Pembina Tk. I (IV/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KARANGANYAR	R. FARIDA RAHMAYANTI, S.Pd. NIP. 19910313 201903 2 017 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN NGEMPLAKREJO	ISWARIN PURBANDINI, S.Pd. NIP. 19711112 201001 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KEBONSARI	EKA PURNAMASARI, S.Pd. NIP. 19750207 200904 2 001 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN PETAMANAN	SULASTRI, S.Pd. NIP. 19711112 200012 2 002 Penata (III/c)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KANDANGSAPI I	DENNI KURNIAWAN, S.Pd.SD. NIP. 19830807 200604 1 014 Penata Muda Tk. I (III/b)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN KANDANGSAPI II	DWI LESTARI, S.Pd. NIP. 19890603 201903 2 007 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN BUGUL LOR	MUKARROMAH, S.Pd. NIP. 19740310 200801 2 006 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN TRAJENG II	UCIK HIDAYATI, S.Pd.SD. NIP. 19870315 201903 2 005 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN PANGGUNGREJO	ACHMAD SIROD JUDDIN, S.Pd. NIP. 19810303 200904 1 003 Pengatur Muda Tk. I (II/d)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN MANDARANREJO I	RISTIN MIVAFARLIAN, S.Pd. NIP. 19920519 201903 2 004 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SDN MANDARANREJO II	MASLUKHA, S.Pd. NIP. 19911121 201903 2 008 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 1 PASURUAN	NENENG FAUZIAH, S.Pd. NIP. 19851106 201001 2 033 Penata (III/c)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 2 PASURUAN	HENDRO JAYALAKSANA, S.Pd. NIP. 19680720 199103 1 011 Pembina (IV/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 3 PASURUAN	ANIES LUSIANA, S.Pd. NIP. 19800226 201001 2 012 Penata (III/c)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 4 PASURUAN	SUCIANI, S.Pd. NIP. 19930213 201903 2 001 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 5 PASURUAN	RINI HIDAYATI, S.Pd. NIP. 19860522 200904 2 003 Penata (III/c)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 6 PASURUAN	ILSA WAJARRIATI, S.Pd. NIP. 19840507 201001 2 037 Penata (III/c)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 7 PASURUAN	YUANITA FIBRIYANTI, M.Pd. NIP. 19840212 200904 2 003 Penata Tk. I (III/d)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 8 PASURUAN	DAYU SUMANTORO, S.Pd.I NIP. 19881015 201903 1 006 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 9 PASURUAN	VINA KRISNAWATI, S.Pd. NIP. 19870410 201001 2 029 Penata (III/c)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 10 PASURUAN	HANA ADITIYA CANDRA, S.Pd. NIP. 19940425 201903 2 006 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS
	UPT SMPN 11 PASURUAN	DONI SETIAWAN, S.Pd. NIP. 199501 201903 1 001 Penata Muda (III/a)	GURU	BENDAHARA BOS

1	2	3	4	5
12.	DINAS KESEHATAN	<p>EVY NURIYANA NIP. 19761108 200701 2 015 Pengatur Tk. I (II/d)</p> <p>WIWIN HERNAWATI, SE. NIP. 19710207 200901 2 002 Penata Tk. I (III/d)</p>	<p>STAF SUBAG SUNGRAM DAN KEUANG</p> <p>STAF SUBAG SUNGRAM DAN KEUANG</p>	<p>BENDAHARA PENERIMAAN</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN</p>
13.	RSUD dr. R SOEDARSONO	<p>SRI KARTIKAWATI NIP. 19730722 200701 2 003 Pengatur Tk. I (II/d)</p> <p>ISTI DWI INDRAMATI NIP. 19821209 201001 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b)</p> <p>ENI YUNIANI NIP. 197906223 200701 2 010 Pengatur Tk. I (II/d)</p>	<p>STAF PELAKSANA</p> <p>STAF PELAKSANA</p> <p>STAF PELAKSANA</p>	<p>BENDAHARA PENGELUARAN</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN BLUD</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN BLUD</p>
14.	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG	<p>KHOLILI, S.Ak NIP. 19730216 200701 1 008 Pengatur Tk. I (II/d)</p> <p>ANI IRAWATI NIP. 19770514 200701 2 015 Pengatur Tk. I (II/d)</p> <p>SITI JUNAIDAH, A.Md.Keb NIP. 19770725 201406 2 001 Pengatur (II/c)</p>	<p>STAF PELAKSANA</p> <p>STAF PELAKSANA</p> <p>BIDAN</p>	<p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA KAPITASI/JKN</p>
15.	UPT PUSKESMAS GADINGREJO	<p>SULFATUL ROHMA NIP. 19740620 200801 2 016 Pengatur Tk. I (II/d)</p> <p>PUTRI FARADIKA, A.Md.Ak NIP. 19950322 202012 2 013 Pengatur (II/c)</p> <p>MUKHAMAD SYEHNAWAFIL, A.Md.Kep NIP. 19910129 201903 1 005 Pengatur (II/c)</p>	<p>PENGELOLA KEUANGAN</p> <p>PENGELOLA KEUANGAN</p> <p>PERAWAT TERAMPIL</p>	<p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA KAPITASI/JKN</p>
16.	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI	<p>ESNI TIWI ARIYATI, A.Md.Kep NIP. 19770425 200604 2 019 Penata (III/c)</p> <p>BAGUS ANDREAWAN, A.Md NIP. 19940609 202012 1 009 Pengatur (II/c)</p> <p>CHURIYANI, A.Md.Kep NIP. 19781018 200604 2 018 Penata Muda (III/a)</p>	<p>PERAWAT PENYELIA</p> <p>PENGELOLA KEUANGAN</p> <p>PERAWAT TERAMPIL</p>	<p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA KAPITASI/JKN</p>
17.	UPT PUSKESMAS KEBONSARI	<p>YURIKA AYU INDRIYATI, A.Md.Keb NIP. 19870927 201705 2 005 Pengatur (II/c)</p> <p>EMMELDAH SUPRAHESTI, A.Md.Kep NIP. 19870921 201101 2 016 Penata Muda Tk. I (III/b)</p> <p>SARTIKA, S.KM NIP. 19891111 202012 2 013 Penata Muda (III/a)</p>	<p>BIDAN TERAMPIL</p> <p>PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN</p> <p>AHLI PERTAMA EPIDEMIOLOGI KESEHATAN</p>	<p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA KAPITASI/JKN</p>
18.	UPT PUSKESMAS TRAJENG	<p>MIDA YANUAR T, A.Md.Keb NIP. 19860122 201704 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)</p> <p>ITA MARTHA KURNIA, A.Md.Kep NIP. 19940330 201903 2 002 Pengatur (II/c)</p> <p>RISA VERASARI, A.Md.Keb NIP. 19880327 201001 2 016 Penata Muda Tk. I (III/b)</p>	<p>BIDAN</p> <p>PERAWAT</p> <p>BIDAN</p>	<p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA KAPITASI/JKN</p>
19.	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL	<p>PUTRI ARRY KARTIKA, S.Farm. Apt NIP. 19921222 202012 2 010 Penata Muda Tk. I (III/b)</p> <p>PUTRI EKA FENIA NIP. 19950701 202203 2 008 Pengatur (II/c)</p> <p>DEWI IRMAWATI, A.Md.Kep NIP. 19901216 201903 2 008 Pengatur (II/c)</p>	<p>AHLI PERTAMA APOTEKER</p> <p>PENGELOLA KEUANGAN</p> <p>PERAWAT TERAMPIL</p>	<p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA KAPITASI/JKN</p>
20.	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG	<p>KRISSANTY SILVIA NICA, A.Md.Kep NIP. 19850630 201001 2 025 Penata Muda Tk. I (III/b)</p> <p>YAYUK TRIANINGSIH, A.Md.Keb NIP. 19861021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)</p> <p>ADE JELITA UMAMI, A.Md.Ak NIP. 19980616 202012 2 004 Pengatur (II/c)</p>	<p>PERAWAT MAHIR</p> <p>BIDAN MAHIR</p> <p>PENGELOLA KEUANGAN</p>	<p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA KAPITASI/JKN</p>

1	2	3	4	5
21.	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG	KAMARUDIN NIP. 19771222 200801 1 015 Pengatur Tk. I (II/d)	PENGELOLA KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
		EKO WAHYUNI, A.Md.Keb NIP. 19740828 201905 2 001 Pengatur Muda (II/a)	BIDAN PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		IDA KUSMANING S, A.Md.Keb NIP. 19840615 201101 2 008 Penata Muda (III/a)	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN	BENDAHARA KAPITASI/JKN
22.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MUDJI ADIJARTO NIP. 19710518 200701 1 016 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN
		EKO PRASTIYO UTOMO NIP. 19830924 200901 1 006 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
23.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	ANTORO AGUS SUBRANTO NIP. 19730817 200604 1 019 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN
		ARIVIDYA PRAHASTUTIK, A.Md NIP. 19950319 201903 2 012 Pengatur (II/c)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UPT RUSUNAWA
		DENI PRIMALIANTO NIP. 19840929 200901 1 005 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UPT PEMAKAM
		ARVIAN LUVIEANTO NIP. 19840803 201001 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	ARIFAH NIP. 19840320 201001 2 021 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
25.	DINAS PERHUBUNGAN	JOHAN SURYANTO NIP. 19821109 200801 1 012 Pengatur Tingkat I (II/ d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN
		WINDA YULIANTI NIP. 19840714 200801 2 011 Pengatur Tk. I (II/ d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU RETREBUSI PARKIR
		SITI JAZILAH NIP.19750915 200701 2 018 Pengatur Muda Tk. I (II/ b)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU RETRIBUSI ANGKUTAN
		RACHMAD HIDAYAT NIP.19750706 200701 1 014 Pengatur Tingkat I (II/ d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU RETREBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
26.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	YUSI SUSANTI, A.Md NIP.19960614 202012 2 011 Pengatur/IIc	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
		ENDAH HARIANI NIP. 19830101 201001 2 003 Pengatur Tk. I (II/ d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
27.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	SUDARTO NIP. 19790605 200901 1 010 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN
		PRENAN ARGADJATOE WIDIANA NIP. 19770821 200801 1 012 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
28.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	HADI PRASETYO NIP. 19810718 200801 1 022 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
29.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	SITI NURONIAH NIP. 19831129 201001 2 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
30.	DINAS SOSIAL	NURKHOLIS NIP. 19790430 200801 1 007 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
31.	DINAS TENAGA KERJA	NUR WULAN AGUSTIARINI NIP. 19860805 201406 2 001 Pengatur (II/c)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
32.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PURWIYONO NIP. 19740212 200701 1 018 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN
		MIRA SHOFIAH NIP. 19801024 200901 2 004 Pengatur Tk. I (II/d)	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN
33.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	ENDAH SETIJORINI NIP. 19710510 200901 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN

1	2	3	4	5
34.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	MARIA ULFA NIP. 19771206 200312 2 005 Pengatur Muda Tk. I (II/b) DYAH ARUM WIDYASARI NIP. 19850701 201001 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN
35.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	DIAN SULISTYOWATI, A.Md NIP. 19880426 201001 2 011 Penata Muda (III/a) NOVIKA HARMAJI PUTRI NIP. 19821108 200801 2 008 Pengatur Tk. I (II/d)	PENGELOLA DATA BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN
36.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ZAHARA FONNA, S.Sos NIP. 19811209 201101 2 007 Penata (III/c)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
37.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DWI IKE MEGOWATI NIP. 19860802 200604 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
38.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BUASAN NIP. 19720903 200901 1 003 Pengatur Muda Tk. I (II/b) KHOIRUL HUDA NIP. 19720818 200604 1 014 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN
39.	SEKRETARIAT DPRD	NURJANAH NIP. 19791105 200801 2 022 Pengatur Tk I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
40.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	WIWIK KUSDI SUDARWATI NIP. 19750204 200701 2 012 Pengatur Tk I (II/d) WHIKA PRAMUSITA NIP. 19820627 200801 2 016 Penata Muda (III/a)	STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN
41.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	RHEZKY RAMADHAN SHAMAD, A.Md NIP. 19820618 201001 1 022 Penata Muda Tk I (III/b) RIFATUL KHUSNIA, SE NIP. 19840420 200311 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN
42.	INSPEKTORAT	NUR IHWAN, A.Md NIP. 19761107 201406 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
43.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	MOHAMAD SLAMET NIP. 19780924 200801 1 010 Penata Muda (III/a)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
44.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	TATIK FARIKHA NIP. 19810421 200801 2 016 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
45.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	KARTIKANAWA NIP. 19680720 199403 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b) DANANG DIMAS WLJAYA, S.Pt NIP. 19840923 201502 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN
46.	DINAS PERIKANAN	INDRIANI SUNSUFI, S.Pi NIP. 19950907 202012 2 016 Penata Muda (III/a)	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA	BENDAHARA PENGELUARAN
47.	KECAMATAN GADINGREJO	SAIKHU ANWAR NIP. 19790614 200801 1 011 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
48.	KELURAHAN GADINGREJO	ABDUL ROHMAN NIP. 19700909 200312 1 003 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
49.	KELURAHAN KARANGKETUG	RIFQI ATIKAH NIP. 19771010 200801 2 026 Penata Muda (III/a)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
50.	KELURAHAN RANDUSARI	ARIANTO HARAHAP NIP. 19830422 201406 1 001 Pengatur (II/c)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
51.	KELURAHAN PETAHUNAN	DIAN ANGGRAENI NIP. 19850922 201001 2 001 Pengatur (II/c)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

1	2	3	4	5
52.	KELURAHAN KRAPYAKREJO	DILLY TIMORA, A.Md NIP. 19860227 202012 2 003 Pengatur (II/c)	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERIN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
53.	KELURAHAN BUKIR	MOCHAMMAD ROBI ABDILA, A.Md NIP. 19950816 202012 1 004 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
54.	KELURAHAN SEBANI	MUHAMMAD RIFAI NIP. 19770904 200901 1 002 Pengatur Tk. I (II/d)	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
55.	KELURAHAN GENTONG	AHMAD FAUZAN SHODIQIN NIP. 19760521 200701 1 012 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
56.	KECAMATAN PANGGUNGREJO	ADI SURACHMAN NIP. 19820506 200801 1 016 Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
57.	KELURAHAN PANGGUNGREJO	SAIDAH WAROH NIP. 19680113 200212 2 002 Penata Muda/ (III/a)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
58.	KELURAHAN MANDARANREJO	RUSDIAN TEGUH WICAKSONO, SE NIP. 19850413 200901 1 002 Penata Muda (III/a)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
59.	KELURAHAN NGEMPAKREJO	MOKHAMAD IRFAN NIP. 19730821 200701 1 013 Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
60.	KELURAHAN TAMBAAN	HASANUDIN NIP. 19860303 201406 1 001 Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
61.	KELURAHAN MAYANGAN	NANING SHOBAH NIP. 19830518 200901 2 004 Pengatur Tingkat I/ (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
62.	KELURAHAN TRAJENG	MUSRIFAH NIP. 19730111 200901 2 002 Pengatur Tingkat I/ (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
63.	KELURAHAN BUGUL LOR	GAGUK EKO PRATIKTIO NIP. 19801230 200801 1 015 Pengatur Tingkat I/ (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
64.	KELURAHAN KANDANGSAPI	YOVIE SAGHITA NIP. 19810805 200901 2 005 Pengatur Tingkat I/ (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
65.	KELURAHAN BANGILAN	MOHAMMAD JUPRI NIP. 19721117 200701 1 007 Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
66.	KELURAHAN KEBONSARI	LU'LUIL MAKNUN NIP. 19820501 200901 2 007 Pengatur Tingkat I/ (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
67.	KELURAHAN KARANGANYAR	TITIK SETIYOWATI NIP. 19701115 200312 2 005 Penata Muda/ (III/a)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
68.	KELURAHAN PEKUNCEN	JETTY NOVIANETTA NIP. 19711109 200701 2 006 Pengatur Tingkat I/ (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
69.	KELURAHAN PETAMANAN	MOCHAMAD SARO'IN NIP. 19691119 200701 1 012 Pengatur Muda/ (II/b)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
70.	KECAMATAN BUGUL KIDUL	RIKIE SULASTRI NIP. 19810112 200311 2 001 Penata Muda (III/a)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN
71.	KELURAHAN BUGUL KIDUL	RIZQIYATUL AULIYAH, A.Md NIP. 19970312 202012 2 017 Pengatur (II/c)	PRANATA KOMPUTER	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
72.	KELURAHAN TAPAAN	FATHUR ROZI, A.Md. Komp NIP. 19881219 202012 1 006 Pengatur (II/c)	PRANATA KOMPUTER	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
73.	KELURAHAN KEPEL	MOCH DENY IRVANDI, A.Md NIP. 19970122 202012 1 006 Pengatur (II/c)	PRANATA KOMPUTER	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
74.	KELURAHAN BLANDONGAN	FERISA KURNIAWAN, A.Md NIP. 19860606 202012 1 006 Pengatur (II/c)	PRANATA KOMPUTER	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
75.	KELURAHAN BAKALAN	ARIS ANDIKA YUDHA, A.Md NIP. 19870115 202012 1 008 Pengatur (II/c)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
76.	KELURAHAN KRAMPYANGAN	AGUSTINING MUKTYOWATI NIP. 19660803 200604 2 008 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
77.	KECAMATAN PURWOREJO	KHUSEN NIP. 19780826 200901 1 005 Pengatur (II/c)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN

1	2	3	4	5
78.	KELURAHAN PURWOREJO	MUHAMAD HABIB, A.Md NIP. 19951102 202012 1 010 Pengatur (II/c)	PRANATA KOMPUTER	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
79.	KELURAHAN POHJENTREK	INDANA ZULFIYAH, Amd.Kom NIP. 19980322 202012 2 004 Pengatur (II/c)	PRANATA KOMPUTER	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
80.	KELURAHAN KEBONAGUNG	ANTOK JULIONO, SE NIP. 19810711 200701 1 005 Penata Muda (III/a)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
81.	KELURAHAN TEMBOKREJO	MUSLIKH NIP. 19790727 200801 1 022 Pengatur (II/c)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
82.	KELURAHAN WIROGUNAN	SITI SAFINAH NIP. 1975 0216 200901 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
83.	KELURAHAN PURUTREJO	HENNY ANSADETA, A.Md. Kom NIP. 19850116 202012 2 003 Pengatur (II/c)	PRANATA KOMPUTER	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
84.	KELURAHAN SEKARGADUNG	PENI PRASTIWI NIP. 19781004 200801 2 011 Pengatur Tk.I (II/d)	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF